

**PRODUKSI DAN REPRODUKSI MEMORI:
PENGALAMAN KELUARGA EKS TAHANAN POLITIK PKI
DI SULAWESI SELATAN**

*PRODUCTION AND REPRODUCTION OF MEMORY: EXPERIENCE OF THE
FAMILY EX-PKI POLITICAL PRISONERS*

Taufik Ahmad

Balai Pelestarian Nilai Budaya Makassar
Jalan Sultan Alauddin/Tala Salapang KM 7 Makassar, 90221
Telepon (0411) 883 748, 885 119 Faksimile (0411) 865 166
Pos-el: taufik_mukarrama@yahoo.com

Diterima: 18 Juli 2018; Direvisi: 29 September 2018; Disetujui: 30 November 2018

ABSTRACT

The political shift from the New Order regime to the reform era has basically given the ex-political prisoners (Tapol) wider space to reproduce traumatic memory in a formal form. In the New Order, the ex-Tapols produced their memory only in the family, and in the reform era, they transmitted their memory to the post-memory in a more open way. This article aims to examine the production and reproduction of memory by taking the case of two families of ex Tapols of PKI (Indonesian Communist Party) in South Sulawesi. By using historical methodology and emphasizing the process, this study proves that memory production of political prisoners was expressed through daily records, letters, and sketches. The memory was transmitted to the generation of post-memory through family stories, pictures and daily behavior. Furthermore, the generation of post-memory reproduces and re-translates the memory inheritance amid socio-political changes. This constellation indicates that during the New Order period, the memory of ex-Tapols only became part of domestic memory, then turned into public memory which was articulated openly in the reform era. However, there are different ways for political prisoners to produce and transmit their memory. The background of ex-tapol; education, family life, and activity in the past, has a significant influence on choices in determining the memory transmission model.

Keywords: *Memory, Post-Memory, Political Prisoners, South Sulawesi*

ABSTRAK

Pergeseran politik dari rezim Orde Baru ke era reformasi pada dasarnya telah memberi ruang gerak lebih luas kepada eks tapol untuk mereproduksi memori trauma dalam bentuk formal. Jika era Order Baru produksi memori eks tapol hanya dalam lingkungan keluarga, maka di era reformasi mereka mentransmisikan memori ke post-memori dengan cara lebih terbuka. Artikel ini mencoba untuk melihat produksi dan reproduksi memori dengan mengambil kasus dua keluarga eks tahanan politik (Tapol) PKI di Sulawesi Selatan. Dengan menggunakan metodologi sejarah dan menekankan pada proses, studi ini membuktikan bahwa produksi memori tapol diekspresikan melalui catatan-catatan harian, surat-surat, dan sketsa. Memori tersebut kemudian ditransmisikan ke generasi post-memori melalui cerita-cerita keluarga, gambar dan perilaku sehari-hari. Selanjutnya, generasi post-memori mereproduksi dan menerjemahkan ulang warisan memori tersebut di tengah perubahan-perubahan sosial politik. Konteks ini mengindikasikan bahwa pada masa Orde Baru, memori eks tapol hanya menjadi bagian dari domestic memory, kemudian berubah menjadi public memory yang diartikulasikan secara terbuka di era reformasi. Akan tetapi, terdapat cara-cara yang berbeda setiap tapol dalam memproduksi dan mentransmisikan memorinya. Latar belakang eks tapol; Pendidikan, kehidupan keluarga, dan aktivitas di masa lalu, memberi pengaruh signifikan terhadap pilihan-pilihan dalam menentukan model transmisi memori.

Kata kunci: memori, post-memory, tahanan politik, Sulawesi Selatan.

PENDAHULUAN

“Di tempat ini dulu adalah *kamp* Tapol yang dikelilingi hutan”, cerita A. M. Hustin kepada puteranya ketika mengunjungi lokasi eks *kamp* pengasingan tapol PKI di Moncongloe, Sulawesi Selatan, Senin 29 September 2014. Sambil memandang jauh ke depan, ia mencoba merekonstruksi memorinya ketika berstatus sebagai tahanan politik, lalu dikisahkan untuk ditransmisikan kepada putranya (Muliadi, *wawancara*, 7 Oktober 2014). Kunjungan A. M. Hustin bersama puteranya ke lokasi eks *kamp* tapol Moncongloe adalah satu dari sekian banyak cara yang dilakukan oleh eks tapol PKI dalam usaha mengekspresikan dan mentransmisikan memorinya ke generasi berikutnya. Keesokan harinya, Gerakan 30 September pun diperingati oleh berbagai kelompok masyarakat dengan cara berbeda-beda. Perdebatan di media lokal dan nasional tentang peristiwa ini memperlihatkan gejala bahwa memori individu eks tapol telah memasuki ruang publik dan didiskusikan secara terbuka. Sebuah kondisi yang nyaris tidak pernah ditemukan di era Orde Baru.

Kemudian, hari berikutnya, 1 Oktober, negara memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Hari kesaktian Pancasila adalah politik memori bertujuan mentransmisikan ingatan terhadap korban kekerasan tujuh Jenderal tetapi mengabaikan korban kekerasan yang terjadi dalam masyarakat (McGregor 2002: 41). Politik memori negara melalui peringatan Hari Kesaktian Pancasila ini berjalan dan diperankan oleh birokrat secara nasional. Semangat anti komunis diartikulasikan dalam berbagai level setiap tahunnya.

Kemudian, selain melalui kegiatan seremonial setiap tahunnya, negara juga membangun politik memori melalui produksi buku, patung, museum, film, dan perundang-undangan, yang bertujuan mencegah berkembangnya komunisme di Indonesia. Kesemuanya bermuara pada satu slogan ‘bahaya laten komunisme’. Produksi memori pada periode ini dimonopoli oleh negara dengan membungkam suara-suara yang berbeda dari

perspektif memori resmi. Akibatnya, terjadi proses marginalisasi memori orang-orang yang dianggap memiliki hubungan dengan PKI atau orang-orang yang kalah dalam pergantian rezim. Setelah era reformasi, kontrol negara terhadap memori mulai melemah, dan pada saat yang sama memori individu eks tapol mulai memasuki ruang publik. Hal ini memperlihatkan terdapat trajektori yang berfluktuatif antara memori individu dengan kontrol negara yang berubah seiring dengan perubahan politik.

Gambaran di atas merupakan suatu kontestasi antara memori negara dengan memori individu eks Tapol PKI yang terjadi sejak Orde Baru. Pengalaman eks tapol mereka sebagai tahanan merupakan memori yang tercecer dan diekspresikan, ditransmisikan dengan caranya sendiri. Cara mengekspresikan memori ini berubah dari waktu ke waktu seiring dengan perubahan sosial politik dalam konteks lebih luas. Jika di era Orde Baru memori individu eks tapol hanya terjebak dalam ruang privasi, maka berbeda di era reformasi di mana memori mereka mulai diartikulasikan dalam berbagai level.

Artikel ini bermaksud untuk melihat produksi dan reproduksi memori dengan mengambil kasus dua keluarga eks tapol di Sulawesi Selatan. Bagaimana esk tapol sebagai korban memproduksi memori traumatis mereka? Bagaimana kenangan traumatis tersebut ditransmisikan dari satu generasi ke generasi berikutnya, terutama ketika menghadapi memori kontra dalam berbagai tempat dalam kehidupan sehari-hari seperti keluarga, sekolah, dan organisasi sosial. Lalu, bagaimana generasi post memory menerjemahkan ulang warisan memori keluarga di tengah perubahan sosial politik dalam konteks lebih luas? Dan, dengan cara apa yang mereka gunakan dalam menghadapi label ‘komunis’?

Studi tentang memori telah banyak dilakukan oleh ilmuan sosial, baik dari persektif sejarah, antropologi, sosiologis, maupun psikologis. Joanne Rappaport (1990) menguraikan secara detail tentang memori masyarakat Indian di Amerika berhadapan

dengan *legal memory* atau memori negara. Dalam pandangannya bahwa memori yang selektif bisa dilihat dari apa yang dikatakan dan yang tidak dikatakan, apa yang senang diungkapkan dan apa yang tidak senang diungkapkan atau disembunyikan, apa yang bisa diungkapkan hari ini, dan apa yang bisa diungkapkan pada hari lain. Penyeleksian dalam pengungkapan memori masa lalu itu juga memiliki politiknya sendiri. Studi Rappaport memperlihatkan kontestasi memori negara dengan memori individu masyarakat Indian. Kemudian, Marianne Hirsch (2008) menguraikan *postmemory* dan hubungannya dengan pengamalan traumatik yang mendahului kelahiran mereka. Hirsch memandang bahwa struktur transmisi memori melibatkan media keluarga sebagai ruang transmisi memori. Pandangan Marianne Hirsch ini mengilhami saya untuk menganalisis memori eks tapol yang ditransmisikan melalui ruang keluarga.

Studi dilakukan oleh James Fenness dan Chris Wickham (1992) lebih menekankan bahwa tidak sekedar proses mental yang sederhana, bukan juga sekedar kata-kata yang digunakan dalam tindakan “mengakui, mengingat, dan mengucapkan kembali dan menjelaskan, tetapi memori dapat dilihat mulai dari sifat pribadi sampai kepada yang bersifat publik. Memori sosial dapat diformat oleh negara melalui produksi buku, film, patung, monumen, museum dan lain sebagainya. Kemudian penekanan pada intergenerasional memori diperlihatkan dalam studi Andrew Conroe (2012) dan Katharine McGroger (2013). Conroe mengetnografi pengalaman eks tapol dan keluarganya, ia berupaya memahami bagaimana cara mereka menerima atau membangun narasi masa lalu mereka. McGroger mengambil studi kasus pada dua aktivis Nahdatul Ulama (NU) dengan pertanyaan utama; bagaimana studi memori melihat kedua aktivis mengubah arah masa lalu dan terlibat dalam upaya perjuangan hak asasi manusia, dilihat dari aspek basis organisasi NU yang memainkan peran penting dari kekerasan 1965, dan mengapa kedua aktivis yang tidak hidup dalam peristiwa 1965 dan dengan basis

organisasi yang berbeda menjadi bagian dari perjuangan hak asasi para korban 1965. Memori antargenerasi tampaknya memberi pengaruh penting membentuk pandangan aktivis terhadap dimensi keadilan sejarah para korban kekerasan tahun 1965. McGregor (2012) juga mengamati politik memori negara melalui peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Menurutnya, sepanjang Orde Baru, peringatan Hari Kesaktian Pancasila merupakan politisasi dan eksklusifitas transisi dari Soekarno ke Soeharto. Awalnya, hanya sebagai sarana klaim kemenangan atas komunisme, kemudian diperluas menjadi ancaman komunisme terhadap Pancasila. Sampai pada era reformasi, peringatan Hari Kesaktian Pancasila tetap mengabaikan memori alternatif esk tapol dari proses transisi kekuasaan Orde Lama ke Orde Baru.

Pada masa Orde Baru, memori eks tapol terjebak dalam lingkungan keluarga dan hanya terbatas pada komunitas mereka. Akan tetapi, setelah era reformasi yang ditandai demokratisasi historiografi Indonesia memberi ruang kepada memori eks tapol memasuki arena publik. Pengalaman indrawi dari eks tapol pun mulai terpublikasikan, misalnya karya Pramoedya Ananta Toer (2000) dan Hersri Setiawan (2004). Pramoedya Ananta Toer dan Hersri Setiawan keduanya dikenal sebagai blok intelektual kiri dalam sastra dan sejarah Indonesia. Lukisan pengalaman indrawi dan batin baik dari Pramoedya maupun Hersri menjadi pembuka tabir tentang tapol Pulau Buru. Kemudian dari pandangan akademik, hasil penelitian Krisnadi (2001) yang mengisahkan tahanan politik di Pulau Buru, kemudian kumpulan esai sejarah lisan eks tapol oleh Jonh Rossa, Ayu Ratih dan Hilmar Farid (ed) diterbitkan tahun 2004, hasil studi Amurwati Dwi Lestariningsih (2011) yang melihat *kamp* pengasingan tapol perempuan di Plantungan, dan Taufik Ahmad (2009, 2012) menarasikan ingatan-ingatan eks tapol di Moncongloe Sulawesi Selatan. Studi-studi akademik ini berbasis pengalaman eks tapol baik selama masa penahanan maupun setelah pembebasan. Produksi buku ini, baik yang

ditulis langsung eks tapol itu sendiri, maupun akademisi pada dasarnya merupakan memori yang diterjemahkan kembali dalam bentuk formal. Hal ini juga merupakan klaim sejarah yang mencoba menolak atau menyanggah tafsir sejarah versi pemerintah.

Memori eks tapol yang telah memasuki arena publik tersebut kemudian diterjemahkan ulang oleh generasi berikutnya baik mereka yang memiliki kaitan genealogis dengan eks tapol maupun mereka yang tidak memiliki kaitan sama sekali. McGregor (2013) telah menggambarkan dua aktivis yang tidak memiliki kaitan dengan korban (tapol), malah keduanya memiliki hubungan dengan organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama, yang memainkan peran kunci dalam kekerasan anti-komunis 1965-1968. Akan tetapi kedua aktivis ini justru menjadi bagian dari apa disebut oleh Morris-Suzuki (2005) sebagai *implicated community* dengan memperjuangkan hak-hak para korban kekerasan. Ingatan kekerasan yang dialami para korban 1965 tampaknya telah menjadi *intergenerational memory* dan diartikulasikan oleh generasi berikutnya. Artikel ini mencoba memahami produksi memori eks tapol dan struktur transmisi *post memory* dengan mengambil kasus dua keluarga eks tapol dengan latar belakang yang berbeda, keduanya juga memiliki cara yang berbeda pula dalam mengtransmisikan memorinya.

Artikel ini diharapkan dapat memberi pemahaman tentang apa yang dirasakan, diingat, dan dipraktikkan dalam memproduksi dan mereproduksi memori sehingga dapat mengantar pada pemahaman utuh, menyeluruh tentang persoalan-persoalan eks tapol dan keluarganya. Pemahaman ini dapat menjadi jendela dalam memahami persoalan-persoalan eks tapol yang lebih luas di seluruh Indonesia sehingga arah rekonsiliasi nasional semakin terbuka.

METODE

Artikel ini menggunakan metode sejarah dengan pendekatan lintas disiplin. Studi memori pada dasarnya terutama berfokus pada upaya

untuk mengingat atau menghadirkan kembali narasi pelanggaran hak asasi manusia sehingga menekankan pada politik masa lalu. Memory studies mendorong menjawab pertanyaan mengapa individu maupun kolektif kembali ke masa lalu dan mengekspresikan penyesalan sosial dalam merespon ketidakadilan sejarah (McGregor 2013). Kemudian *post-memory* mendeskripsikan hubungan generasi kedua dengan pengalaman yang kuat, sering traumatis, yang mendahului kelahiran mereka (Hirsch 2008). Eks tapol mentransmisikan memorinya ke anak mereka. Anak eks tapol kemudian menerima memori trauma dan diekspresikan dengan cara berbeda.

Memori kemudian dikaitkan dengan lingkungan, komunitas, dan kontrol negara. Kontrol negara dari periode rezim berbeda mengalami fluktuatif yang pada akhirnya mempengaruhi cara-cara orang bersuara dalam mengungkapkan memorinya. Sejauhmana eks tapol memahami lingkungannya, memaknai dirinya akan memberi pengaruh terhadap sikap dan prilaku dalam menyuarakan memori mereka, adalah aspek penting yang akan dilihat dalam studi ini. Ingatan masa lalu eks tapol yang disuarakan merupakan tindakan imajinatif, proses konstruktif yang kreatif dan berkorelasi dengan komunitas dan negara. Sebab yang diingat adalah yang dipahami, dimengerti dan yang diperhatikan atau yang kita inginkan (Bolles 1988:xii). Semua proses mengingat masa lalu adalah produk dari kesadaran individu, masyarakat, dan bahkan negara. Karenanya tidak semua memori masa lalu itu tersimpan dalam ingatan atau diingat, bahkan ada yang terlupakan atau sengaja dilupakan baik oleh negara, masyarakat dan individu.

Untuk melihat produksi dan reproduksi memori eks tapol, saya menggunakan pendekatan lintas disiplin. Dalam proses pelaksanaannya, pendekatan lintas disiplin itu menghargai fleksibilitas metodologis yang lebih luas. Artinya tidak kaku dan tidak egois dalam penerapan metodologi penelitiannya. Adapun cara-cara mengintegrasikan pandangan lintas disiplin

adalah dengan membuat pelintasan, jembatan antar disiplin, memetakan penyatuan perbedaan, dan menggabungkan bahasa disiplin, sejarah dan antropologi. Pendekatan lintas disiplin ini akan membawa dampak pada fleksibilitas metode pengumpulan sumber informasi. Metode pengumpulan informasi studi ini meliputi *ego document* eks tapol dan menegenografi pengalaman eks tapol periode pengasingan dan pembebasan. Kemudian, data dianalisis dengan mensinkronkan perubahan-perubahan sosial politik dalam konteks lebih luas. Pembahasan penelitian pada akhirnya memperlihatkan narasi historis dari produksi dan reproduksi memori eks tapol dari Orde Lama ke Orde Baru.

PEMBAHASAN

Periode Pengasingan: *Produksi Memori Tapol*

Tahanan politik atau tapol adalah identitas yang dilabelkan oleh negara kepada mereka yang ditahan atas tuduhan anggota atau simpatisan Partai Komunis Indonesia. Di Sulawesi Selatan, jumlah tapol mencapai 9.765 orang, dan 911 orang dari mereka diasingkan di Moncongloe, sebuah hutan yang berada di perbatasan Kabupaten Maros dengan Kabupaten Gowa. Mereka yang diasingkan adalah fungsionaris PKI, Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI), Pemuda Rakyat, Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra), Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani), Konsentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia (CGMI), Barisan Tani Indonesia (BTI), anggota Sarikat Buru Pekerja, dan terdapat juga yang tidak memiliki hubungan dengan kegiatan-kegiatan organisasi politik. Mereka berasal dari berbagai lapisan dan golongan masyarakat, seperti, Politisi, Militer, Pejabat Pemerintah, Karyawan perusahaan, praktisi hukum, dosen/guru, mahasiswa, pelajar, petani dan lain sebagainya (Ahmad, 2009: 131).

Pembukaan *kamp* pengasingan di berbagai tempat di Indonesia merupakan bagian dari kebijakan Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Pangkoptib) dimaksudkan untuk mengurangi pembiayaan negara terhadap tapol dengan jumlah yang

besar (Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Sulawesi Selatan, Arsip Saleh Lahade Reg. 941). Mongcongloe kemudian menjadi daerah terpilih untuk dijadikan *kamp* pengasingan tapol di bawah pengawasan Tim Pemeriksa Daerah (Teperda) Sulawesi Selatan dan Tenggara, dengan berbagai alasan; *pertama*, sebagian besar wilayah Moncongloe masih merupakan hutan dengan sumber daya hutan yang memadai, *kedua*, Moncongloe merupakan wilayah Kodam XIV Hasanuddin dan diproyeksikan untuk pembangunan *home base* militer. Pembukaan *kamp* pengasingan akan mempermudah proses pembangunan infrastruktur untuk kebutuhan militer. *Ketiga*, wilayah Moncongloe sebagian besar masih merupakan hutan negara sehingga memudahkan dalam mengontrol dan mengakses sumber daya hutan (Ahmad 2012:174).

Pada Maret 1969, *Kamp* Pengasingan Moncongloe mulai dirintis dan rampung pada akhir tahun 1969 dengan fasilitas; empat barak laki-laki, satu barak perempuan, masjid, geraja, poliklinik, lapangan olahraga/upacara, koperasi dan dapur umum. *Kamp* pengasingan luasnya 150 persegi dan dikelilingi dengan kawat berduri. Di sinilah para tapol mengawali kisah-kisah baru mereka. Sebuah *kamp* pengasingan yang sebelumnya dipenuhi rumput ilalang setinggi dua meter dan bambu berduri yang lebat, ditengah-tengahnya kini berdiri sebuah *kamp* pengasingan untuk orang-orang yang ditahan karena tuduhan terindikasi dengan Gerakan 30 September 1965.

Dua kasus tapol dengan latar belakang etnis berbeda akan menjadi fokus pada bagian ini. Mereka adalah Ir. Rasjidi Amra dan A.M. Hustin. Kedua tapol ini memiliki cara tersendiri dalam memproduksi dan mengekspresikan memorinya. Ir. Rasjidi Amra berasal dari Polewali Mandar dan telah menyelesaikan pendidikan di Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin. A. M. Hustin berasal dari Kabupaten Barru dan merupakan mahasiswa yang masih menempati tingkat pertama Jurusan Tekni Sipil Universitas Hasanuddin, aktif dalam berbagai kegiatan mahasiswa, terutama dalam organisasi Konsentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia

(CGMI). Kedua eks tapol ini memperlihatkan cara-cara yang berbeda dalam mengingat dan mentransmisikan memorinya.

a. Ingatan Dalam Sketsa (Kasus Rasjidi Amra)

Rasjidi Amra adalah salah satu dari sekian banyak orang-orang yang dituduh sebagai pengikut komunis, ditangkap pada akhir tahun 1965 dan diasingkan di Moncongloe pada tahun 1972 sampai 1978. Sebelum ditangkap, ia sempat menyelesaikan pendidikan tingkat Sarjana Muda di Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin, kemudian menjadi guru di Sekolah Perhubungan Laut. Pada saat yang sama ia juga melanjutkan pendidikan untuk mencapai gelar sarjana lengkap di Fakultas Teknik Unhas. Prestasi yang baik selama menempuh pendidikan sehingga Rasjidi Amra mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan di Rusia dengan beasiswa dari pemerintah.

Akan tetapi, sebelum Rasjidi Amra melanjutkan pendidikan, pada akhir tahun 1965, ia ditangkap atas tuduhan sebagai pengikut atau simpatisan PKI. Dalam proses penangkapan, pemenjaraan sampai pada pengasingan, Rasjidi Amra tidak pernah mendapat penjelasan dasar penangkapannya. Penangkapan, pemenjaraan dan pengasingan tanpa melalui proses pengadilan sehingga ia tidak mengetahui dasar hukum penangkapannya. Ia hanya dikaitkan dengan organisasi CGMI, sebuah organisasi *underbouw* dari Partai Nasional Indonesia (PNI). Namun, Rasjidi Amra menyatakan sama sekali tidak terlibat dalam organisasi kemahasiswaan dan organisasi politik. Menurutnya ada dua kemungkinan menjadi dalih ia dituduh sebagai simpatisan PKI, *pertama* ia mendapatkan beasiswa pemerintah untuk melanjutkan studi di Rusia sehingga dikaitkan dengan paham komunis. Dan *kedua*, boleh jadi terdapat orang-orang yang tidak senang atas kesuksesannya sehingga ia dituduh sebagai komunis. Di usia yang masih muda, sebagai guru, mendapat fasilitas memadai dari Departemen Perhubungan, dan memiliki prestasi yang cukup baik. Namun, bagi Rasjidi

Amra, alasan ini hanya dugaan karena sampai sekarang ia tidak mendapatkan penjelasan dari pemerintah atas penangkapannya (Rasjidi Amra, *wawancara* 10 November 2015).

Sebagai seorang yang berlatar belakang ilmu arsitektur, selama dalam *kamp* pengasingan, Rasjidi Amra mendapat pekerjaan yang berkaitan keahliannya sehingga pekerjaan yang dibebankan cukup ringan dibandingkan dengan tapol lain. Rasjidi Amra tidak dilibatkan dalam korve. Rasjidi Amra bertugas untuk mengukur tanah-tanah yang akan dibagi kepada tapol, merancang pembangunan masjid dan gereja dalam *kamp* pengasingan, serta merancang pembangunan perumahan militer. Selain itu, Rasjidi Amra juga terlibat dalam berbagai proyek-proyek Kodam XIV Hasanuddin sebagai tenaga sukarela. Seperti merintis pembangunan jalan antara Moncongloe dengan Daya, membangun rumah-rumah pribadi militer dan lain sebagainya. Boleh dikatakan Rasjidi Amra mendapat perlakuan cukup baik selama dalam tahanan dan pengasingan. Bahkan Rasjidi Amra diperbolehkan menikahi seorang putri dari anggota militer petugas *Kamp* Pengasingan di Moncongloe meskipun ia masih berstatus tahanan politik.

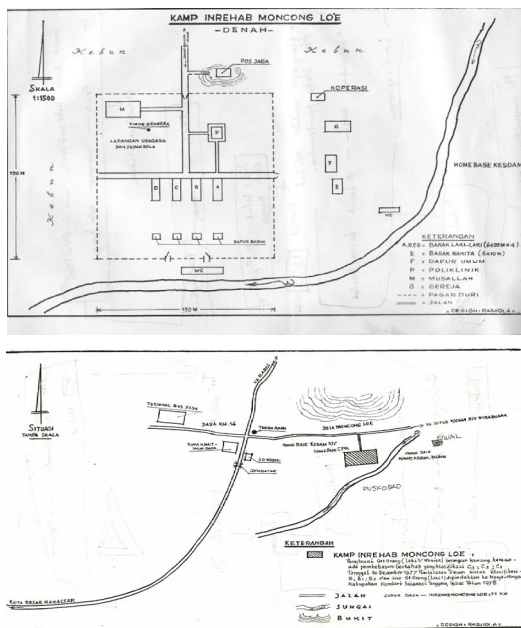


Gambar 1 Ir. Rasjidi Amra (tengah) mendesain pembangunan perumahan sederhana Kodam XIV Hasanuddin di Lonjo Boko Kab. Gowa, tanggal 15 Mei 1972

(Koleksi Foto Ir. Rasjidi Amra)

Keahlian Rasjidi Amra kemudian memengaruhi cara-cara dalam membangun memori selama dalam *kamp* pengasingan Moncongloe. Pekerjaan mengukur tanah baik

untuk anggota militer (petugas *kamp*) maupun tanah yang akan digarap oleh tapol, dimanfaatkan oleh Rasjidi Amra untuk menggambar denah lokasi *kamp* pengasingan Moncongloe. Denah dan sketsa merupakan sarana bagi Rasjidi Amra dalam memahami kondisi *kamp* pengasingan. Langkah awal yang ditempuh dengan membuat sketsa dalam pemikirannya kemudian dituangkan dalam bentuk gambar. Gambar, dena, atau sketsa yang dibuat diusahakan sedetail mungkin sehingga menggambarkan kondisi *kamp* yang sebenarnya.



Gambar 2 Dena Kamp Pengasingan Moncongloe (koleksi Ir. Rasjidi Amra)

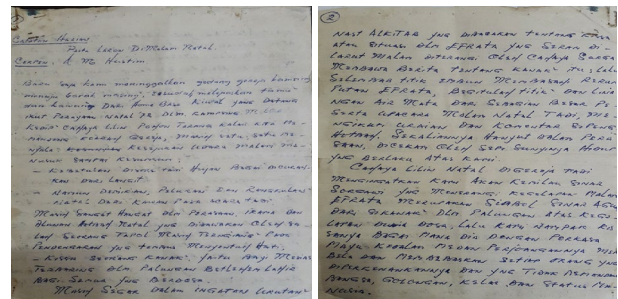
Dena dan sketsa merupakan sarana memori yang efektif yang menggambarkan ruang selama dalam *kamp* pengasingan.

b. Memori dalam Surat dan Catatan Harian (Pengalaman A. M. Hustin)

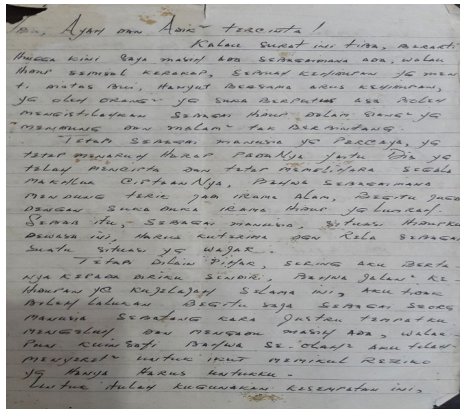
A. M. Hustin berasal dari keluarga religius. Ayahnya adalah seorang imam yang cukup dihormati di lingkungan tempat tinggalnya. Ia berasal dari salah satu kampung di Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan. Sebelum ditangkap atas tuduhan pengikut simpatisan PKI, A. M. Hustin adalah mahasiswa Teknik Sipil Universitas Hasanuddin dan aktif dalam kegiatan kemahasiswaan terutama organisasi

CGMI. Ketika berstatus mahasiswa, A.M. Hustin telah berkenalan dengan berbagai aktivis dari organisasi lain, seperti LEKRA (Lembaga Kebudayaan Rakyat), Pemuda Rakyat, dan lain sebagainya. Laiknya seorang aktivis, dengan kepekaan kondisi sosial politik, ia aktif dalam kajian-kajian, diskusi tentang masalah sosial, budaya dan perkembangan politik lokal dan nasional. Perdebatan-perdebatan dan konflik politik-ideologis ditingkat nasional mempengaruhi tema-tema diskusi di kalangan mahasiswa dan pelajar. Sebuah kondisi di mana bangsa ini melewati proses belajar berdemokrasi.

Pengalaman yang cukup memadai sebagai aktivis tampaknya menjadi pisau analisis bagi A. M. Hustin dalam melukiskan eksistensinya selama dalam *kamp* pengasingan. Melukiskan pengalaman indrawi melalui surat, cerpen dan catatan-catatan pribadi bukan tanpa resiko, karena ia harus menghindari razia/pemeriksaan petugas. Sebagian besar dari surat-surat dan catatan itu harus dihancurkan ataupun disembunyikan di toilet agar terhindar dari razia petugas *kamp*. Negara melalui militer tampaknya telah berupaya membendung memori setiap tapol agar tidak ditransmisikan ke generasi berikutnya. Namun bagi A. M. Hustin, pena dan kertas merupakan senjata untuk memproteksi ingatan yang seyogyanya berkesinambungan ke keluarga dan generasi berikutnya. Oleh karena itu, setiap peristiwa penting untuk ia kenang, seperti upacara 17 Agustus, Lebaran, Natal, kerja paksa, penyakit, penderitaan, harapan, ia tidak melewatinya tanpa merekam melalui tulisan, baik berupa surat kepada orang tuanya maupun catatan harian dalam bentuk cerpen.



Gambar 3 Petikan dari Catatan Harian A.M. Hustin



Gambar 4 Salah satu surat A. M. Hustin Kepada Orang Tuanya

Selain catatan pribadi dan cerpen, A. M. Hustin juga memproduksi memorinya melalui surat-surat yang dikirim ke orang tuanya baik melalui pembesuk ataupun sekedar tersimpan dalam catatannya. Surat A.M. Hustin ini berisi tentang pengalaman, perasaan, harapan-harapan, sebagai orang tahanan. Seperti surat A. M. Hustin terkait dengan kondisi kesehatan yang dialami selama dalam pengasingan. Dalam suratnya ia menguraikan kondisi kesehatannya, dirawat di bangsal-bangsal barak atau pengobatan di poliklinik. Akan tetapi karena pengobatan poliklinik tidak memadai serta hanya menanggung biaya Rp. 400 per-tapol selama delapan bulan (Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Sulawesi Selatan, Arsip Kota Makassar Reg. 939), sementara penyakit kuning yang diderita A.M. Hustin semakin parah sehingga ia harus dirawat di rumah sakit Palomonia Makassar.

Kondisi kesehatan A. M. Hustin dalam suratnya memperlihatkan penderitaan tapol pada umumnya. Pasokan gizi yang sangat minim dan fasilitas kesehatan yang tidak memadai tidak berimbang dengan frekuensi kerja wajib tapol menguras sistem ketahanan tubuh mereka, sehingga secara pelan-pelan memperburuk kondisi fisik tahanan. Gambaran kondisi tapol dapat dilihat dalam surat A.M. Hustin kepada kedua orang tuanya sebagai berikut:

Yang saya maksudkan dalam masalah (problem) hidup yang memberati saya sehari-hari adalah menyangkut keadaan

fisik (kesehatan) saya yang semakin hari semakin jelek. Justru itu saya tidak mampu lagi untuk bergerak seperti teman-teman lain yang kesehatannya masih utuh untuk bergumul dengan kesulitan sekedar menanggulangi kebutuhan ekonomi sehari-hari. Sekarang saya dalam soal pengerahan tenaga, bekerja sehubungan dengan jam2 dinas saya bila agak diporsir maka saya harus sakit (apabila bekerja sesudah dinas untuk sekedar tambahan) (Dokumen Surat Pribadi A.M. Hustin)

Selain memuat informasi keadaan pribadi A. M. Hustin, ia juga menulis tentang keadaan *kamp* pengasingan pada umumnya. Seperti dalam catatannya tentang kondisi semakin buruk karena kemarau panjang pada tahun tahun 1972.

Sudah setahun lamanya kami tak mendapat sayur dan ikan dari dapur umum kamp. Hanya mendapat beras satu belek susu dan garam satu belek susu untuk satu bulan. Rumput yang biasa kami gunakan sebagai sayur dari hutan seperti sentriom lempuyang dan daun-daun ubi di kebun seluruhnya belum bertunas akibat kemarau yang sangat panjang di tahun ini. Begitu pula jeni-jenis ikan, siput, kepiting dan udang di sungai yang mengalir di belakang barak tidak ada karena sungai kering karena kemarau. Sayur yang dibawa oleh para kelontong dari kota tak mampu kami beli, kami tak berduit, kami miskin melarat, - ya! Nasib tahanan. (Catatan Harian A. M Hustin)

Selain gambaran kondisi *kamp* pengasingan, A. M. Hustin juga menyimpan memorinya melalui surat yang mengandung pengharapana-pengharapan seorang tahanan untuk hidup lebih baik. Dalam suratnya, ia menguraikan;

Sedikit saya bisa memberikan bayangan sebagai salah satu cara untuk meringankan saya ialah bahwa di sana (Moncongloe) kami ada mempunyai koperasi yang anggota2nya terdiri atas tapol semua dari

pelaksananya (pengurusnya) dari tapol juga tetapi akan pengawasan petugas Corps Polisi Militer (CPM). Dari berbagai sektor kegiatannya telah berlangsung kira-kira tiga tahun ini, antara lain menerima uang titipan (simpanan) dari anggota dengan punya imbalan jasa (bunga) 5 persen sebulan. Sangat menarik perhatian saya kehidupan sebagian teman-teman saya telah menempuh jalan ini, di mana mereka telah boleh mengatur hidupnya walaupun sederhana mungkin dengan hasil uang titipan mereka di koperasi.

Dengan maksud inilah mendorong saya mendatangi ayah bunda lewat surat ini kiranya restu dan sekaligus layanan cinta kasih dari ibu bapak untuk meringankan kesehatan dan fisik saya yang semakin hari semakin buruk

Kiranya hal itu termakan di hati ayah bunda dan tidak akan terlalu menyulitkan pengusahaannya maka anakda mengincar-incar kalau ada Rp. 20.000, - (dua puluh ribu rupiah) berarti sudah boleh mendapat imbalan Rp. 1.000 (Seribu rupiah) tiap bulan.

Seribu tiap bulan ini akan menolong kehidupan saya dalam arti semuanya mungkin, tetapi yang pasti sebaiknya kontinu (tidak terputus) daripada kiriman yang insedentil walaupun mungkin dalam jumlah yang banyak, tetapi sulit diatur (direncana) (Surat Pribadi A. M. Hustin, 16 Januari 1977)

Surat dan catatan A. M. Hustin merupakan politik memori tapol dalam *kamp* pengasingan. Politik memori merupakan alat yang digunakan untuk merekam, mengingat atau mengedit dan mengkonstruksi sebuah versi fakta sejarah yang sebelumnya: dihilangkan, dikaburkan, dan disembunyikan (Nasrallah, 2005). Surat dan catatan A. M. Hustin adalah politik memori tapol. Suatu politik memori untuk memproteksi memori mereka agar tidak menjadi fakta sejarah yang dikaburkan oleh penguasa.

Periode Pembebasan: *Greedy Memory vs Domestic Memory*

The greedy state atau negara rakus menggambarkan karakter kekuasaan pada masa Orde Baru di bawah Presiden Soeharto (Abdullah 2009). Dalam masa ini, negara tidak hanya menguasai kehidupan politik dan ekonomi, tetapi juga dengan rakus merasuk ke bidang-bidang lain; sosial, budaya, agama, dan seterusnya. Bahkan, negara berupaya menguasai dan menciptakan slot memori melalui tafsir tunggal narasi sejarah, terutama yang dianggap dapat mengancam eksistensi negara. *Greedy state* adalah *greedy memory*. Dalam konteks politik memori Gerakan 30 September atau memori tentang komunis di Indonesia, Orde Baru membangun memori resmi melalui produksi regulasi, film, patung, museum dan peringatan-peringatan secara nasional sehingga memunculkan musuh bersama “bahaya laten komunis”. Akibatnya, orang-orang yang dianggap memiliki hubungan dengan komunis mendapat stigma buruk sebagai orang tidak bersih lingkungan sehingga kehilangan hak-hak politik dan sipil. Pada periode ini, memori eks tapol hanya menempati ruang privasi.

Politik memori negara yang menyentuh semua aspek kehidupan mengakibatkan eks tapol kehilangan hak sipil dan politik. Eks tapol yang dikembalikan ke masyarakat diwajibkan melaporkan diri kepada Lurah/Kepala Desa atau yang setingkat satu kali dalam satu minggu. Kewajiban yang dibebankan kepada tapol ini dimaksudkan untuk melakukan pengawasan kepada tapol. Dalam pelaksanaan pengawasan berdasarkan sifatnya dilakukan dengan berbagai cara; yaitu dilakukan secara umum keseluruh warga masyarakat, hanya dalam hal ini diadakan penekatan tertentu di bidang pengadministrasian warga penduduk. Dilakukan juga secara khusus kepada perilaku tapol bersangkutan, baik secara aktif maupun pasif. Unsur-unsur yang melaksanakan pengawasan yaitu pemerintah daerah termasuk RW/RK/RT, POLRI dan Pelaksana Khusus (LAKSUS). Kegiatan pengawasan ini dilakukan untuk

memperkecil ruang gerak eks tapol di dalam masyarakat sehingga fungsi dan perannya dapat diminimalkan sampai pada adanya jaminan masyarakat tidak tercemar dengan pikiran-pikiran komunis. Tampaknya, sampai tapol dibebaskan, masih tertanam dalam pemikiran aparat pemerintah bahwa eks tapol itu “tidak bersih lingkungan” sehingga segala gerak-geriknya harus diawasi dengan dalih ‘demi keamanan dan ketertiban’.

Selain wajib lapor mereka masih menerima “bimbingan” atau penataran khusus untuk eks tapol PKI yang dilaksanakan oleh Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan. Seluruh biaya penataran ditanggung oleh Pemerintah (Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Sulawesi Selatan, Arsip Kotamadya Ujung Pandang, Reg. 936). Materi penataran meliputi pemahaman dan pengalaman Pancasila serta UUD 145 atau sejenis dengan istilah Pendidikan Pemahaman dan Pengalaman Pancasila (P4).



Gambar 5 Penataran P4 bagi esk tapol

Perlakuan diskriminatif Orde Baru terhadap eks tapol bukan saja pengingkaran terhadap HAM, tapi sudah merupakan bentuk penghukuman tanpa batas. Dengan alasan pengawasan, pemerintah memberlakukan pencantuman kode tertentu pada Kartu Tanda Peduduk (KTP) mantan tapol. Tindakan Orde Baru ini, sadar atau tidak sadar telah membuat diskriminasi terhadap warga negaranya. Mantan tapol memang diharuskan memiliki KTP yang berbeda dengan warga negara Indonesia lainnya karena ditambah kode ET (Eks Tahanan Politik) (Krisnadi, 2001:196). Hal ini merupakan suatu mekanisme yang tepat dalam pengontrol eks

tapol. Segala kegiatan kemasyarakatan, mulai dari pindah rumah, pernikahan, surat-surat izin lainnya biasanya dimulai dengan menunjukkan KTP. Dengan KTP yang dimiliki mantan tapol yang ditelah diberi kode ET, setiap mantan tapol harus mendapatkan “Surat Keterangan Tidak Terlibat Dalam G 30 S/PKI”, kalau yang bersangkutan hendak melamar suatu pekerjaan. Mustahil mendapat surat tersebut, karena stigma tambahan telah dicantumkan dalam KTP-nya dengan kode ET. Bukan hanya bekas tapol yang menerima perlakuan diskriminatif, tetapi juga anak sampai cucu mereka.

Di tengah kondisi tekanan pemerintah, Rasjidi Amra, dengan keahliannya dalam bidang arsitektur mendapat posisi lebih diuntungkan daripada eks tapol lain. Bahkan Rasjidi Amra mendapat penghargaan dari beberapa pejabat di Majene atas karyanya dalam bidang arsitektur, seperti pembangunan pasar sentral Majene, pembangunan Masjid Raya Majene tidak terlepas dari bantuan Rasjidi Amra. Rasjidi Amra kemudian bekerja sebagai konsultan pada proyek-proyek pemerintah dengan menutupi identitasnya sebagai tapol.

Berbeda dengan A. M. Hustin, setelah ia memperoleh pembebasan, ia kembali ke kampung halamannya dan meneruskan pekerjaan orangtuanya sebagai Imam di sebuah masjid. A. M. Hustin memainkan peran yang kontradiktif dalam masyarakat. Sisi lain ia dianggap sebagai eks tapol yang masih wajib lapor, mendapat tekanan dari pemerintah, dianggap sebagai orang berbahaya dari sudut pandang ideologis, namun sisi lain, ia berasal dari keluarga yang terpendang, taat agama serta mewarisi tradisi keluarga sebagai pemimpin religius (Imam). Peran penting dalam bidang agama ia tunjukkan ketika menjabat sebagai pengurus Cabang Derah Muhammadiyah Kabupaten Barru.

Generasi *Postmemory* (Kasus Rasjidi Amra dan A. M. Hustin)

Pada masa Orde Baru nyaris tidak ditemukan ruang bagi eks tapol untuk mempublikasikan memorinya. Memori eks tapol

hanya terjebak dalam ruang privasi keluarga dan hanya dapat ditransmisikan ke post memori melalui media cerita, gambar, dan perilaku. Namun, negara juga tidak diam dalam melihat proses transmisi memori eks tapol melalui serangkaian kebijakan yang diskriminatif terhadap keluarga eks tapol. “Istilah bersih diri” dan “bersih lingkungan” yang tersebar pada 1980-an merupakan tafsiran masyarakat atas petunjuk pelaksanaan “screening mental ideologis” yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri pada 1982. Selain esk tapol, screening juga dilakukan pada lingkungan keluarganya, persaudaran, pergaulan yang dominan atau sangat berpengaruh pada sikap, perilaku dan mental ideologi seseorang. Yang dikategorikan lingkungan dominan adalah orang tua terhadap terhadap anak-anaknya, mertua terhadap menantu, nenek terhadap cucu yang diasuh, atau paman, kakak, orang lain yang pernah membiayai kehidupan anak atau seseorang, pernah menanam budi, menolong dalam waktu relatif lama, dan sebagainya. Bisa juga suami terhadap istri atau sebaliknya, bahkan lingkungan pergaulan.

Kebijakan diskriminatif negara terhadap eks tapol dan keluarganya dimaknai berbeda oleh Rasjidi Amra dan A. M. Hustin. Rasjidi Amra lebih menekankan perlunya posisi aman bagi putra-putrinya untuk tidak merasakan akibat buruk dari statusnya sebagai eks tapol. Oleh karena itu, sedapat mungkin identitasnya sebagai eks tapol tidak diketahui generasinya. Oleh karena itu, Rasjidi Amra berusaha menyembunyikan identitasnya kepada putra-putrinya. Tindakan ini dimaksudkan untuk menghindari beban psikologis yang pada akhirnya menghambat perkembangan anak-anaknya. Rasjidi Amra dalam mentransmisikan memorinya lebih bersifat pragmatis, terdapat kekhawatiran jika putra-putrinya kelak tidak mendapatkan pekerjaan, kehidupan yang layak karena memiliki orang tua sebagai eks tapol. Oleh karena itu, tidak ada komunikasi yang intens, diskusi yang alot tentang sejarah, tidak ada kisah dituturkan terkait dengan marginalisasi warga negara. Kondisi ini memperlihatkan

lemahnya transmisi memori. Bahkan terdapat kecenderungan keinginan Rasjidi Amra untuk memutus rantai memori sehingga tidak ada satupun dari putra-putrinya tertarik pada isu sosial politik. Hasil yang dicapai adalah putra dan putrinya dari Rasjidi Amra dapat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Berbeda dengan Rasjidi Amra, A. M. Hustin justru memberi penguatan karakter kepada putranya, menjadikan dirinya sebagai figur yang kuat untuk diteladani sehingga pada akhirnya puteranya dapat memahami persoalan dan menerima orangtuanya sebagai eks tapol. Nampaknya, A. M. Hustin ingin mentransmisikan memori kepada anaknya melalui pendidikan keluarga, perilaku, diskusi tentang politik dan sejarah. Ruang keluarga yang begitu terbuka pada akhirnya melahirkan generasi post memori. Dalam penuturan Muliadi, putera A. M. Hustin bahwa:

Suatu ketika, ketika saya pulang sekolah, waktu itu masih di sekolah dasar, baru saja saya memperoleh pelajaran tentang kekejaman PKI. Saya kemudian bercerita kepada bapak saya, bahwa PKI itu sangat kejam. Ketika itu bapak saya bertanya

+ siapa yang bilang PKI itu kejam

- Guru saya di sekolah

Bapak saya terdiam, kemudian secara pelan-pelan menjelaskan tentang PKI dan Suharto. Saya terdiam dan belum begitu mengerti. Akan tetapi seiring dengan berjalannya waktu, sampai saya duduk di bangku sekolah menengah pertama, baru saya mengerti dan menyadari jika bapak saya adalah seorang eks tapol. Saya pun kemudian menghubungkan dengan ancaman-ancaman guru jika saya berbeda pendapat tentang peristiwa gerakan 30 September 1965. Sejak itu saya selalu berdebat dengan guru sejarah saya di sekolah, dan sering terlontar ancaman dilaporkan ke Kodim (Muliadi, wawancara 7 Oktober 2014).

Pertarungan kontradiktif antara pelajaran sejarah di sekolah dengan pendidikan yang diperoleh di keluarga mengakibatkan Muliadi sering kali terlibat perdebatan dengan guru sejarah di sekolah. Hal ini memperlihatkan bahwa transmisi memori individu A. M. Hustin, meskipun hanya ditransmisikan melalui sikap, prilaku dan kisah, namun berjalan dengan efektif sehingga melahirkan generasi post memori. Dalam berbagai kasus, Muliadi tidak gentar menghadapi ancaman dan cemooh bahwa dirinya seorang anak dari eks tapol. Hasil yang diperoleh dari transisi memori ini melahirkan sebuah keberlangsungan memori. Diskriminasi yang dirasakan oleh Muliadi sejak duduk di bangku sekolah dasar sampai sekolah menengah atas justru semakin memunculkan sensitivitasnya terhadap isu-isu sosial politik, yang pada akhirnya mempengaruhi, pikiran dan tindakannya.

Akan tetapi selama Orde Baru proses transmisi memori eks tapol, baik dilakukan oleh Rasjidi Amra maupun A. M. Hustin hanya menempati ruang privasi. *Hidden memory* menandai periode kelam dari eks tapol dan keluarganya.

Era Reformasi: *Public Memory*

Melemahnya kontrol negara terhadap eks tapol setelah Orde Baru berakhir memberi ruang munculnya memori alternatif yang selama ini tersembunyi. Pada tingkat personal, permintaan maaf yang pernah dilontarkan KH. Abdurrahman Wahid sebagai tokoh NU, walau tidak memberi dampak pada perubahan arah kebijakan negara, tetapi telah memulai sesuatu yang segar bagi para korban peristiwa 1965. Terbukti, pada tanggal 10 Januari 2001, Samaun Utomo mendirikan suatu organisasi yang diberi nama Lembaga Perjuangan Rehabilitasi Pegawai Negeri Korban Rezim Orba. Lembaga ini bertujuan untuk memperjuangkan rehabilitasi bagi para pegawai negeri sipil yang diberhentikan karena dianggap terlibat dalam gerakan 30 September. Meskipun kemudian tidak terbukti atas keterlibatannya, tetapi mereka

tidak mendapatkan hak-haknya sebagai pegawai negeri sipil. Pada tanggal 20 Oktober 2002, lembaga ini mengalami perubahan nama yakni Lembaga Perjuangan Rehabilitasi Korban Rezim Orde Baru (LPR-KROB). Dengan perubahan ini, maka cakupan perjuangan lembaga ini tidak hanya ditujukan kepada pegawai negeri sipil tetapi seluruh korban peristiwa 1965.

Pada tahun itu juga, dibentuk cabang dari LPR-KROB di Sulawesi Selatan dengan susunan pengurus; Ir. Rasjidi Amra (ketua), M.S. Baharuddin (Wakil Ketua I), Sunar I.S, (Wakil Ketua II), Parinsen Sommen (Sekretaris), Muhammad Jufri Buape (wakil sekretaris I), Sarmanto Sarmo (wakil Sekretaris II), Samet S (Bendara I) Sri Soetyowati (Bendahara II), Sunar I.S, Munis, dan Lamaeda (Biro Organisasi), Achmad Gazali, Samun Gaddong, Muhammad Jufri Buape (Biro Penerangan), Anwar Abbas, M.S. Baharuddin (Biro Data dan Dokumentasi), Mawardi Y.S, Rahma, U.S, Rahmat (Biro Sosial Ekonomi).

Akan tetapi eks tapol memperlihatkan cara berbeda dalam memaknai ruang yang lebih bebas di era reformasi. Bagi Rasjidi Amra melihat bahwa LPR-KROB merupakan wadah perjuangan untuk menuntut hak-hak warga negara yang telah dirampas oleh negara. Sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil sebelum ditangkap, secara personal Rasjidi Amra memiliki harapan untuk mendapatkan kompensasi. Dalam setiap forum Rasjidi Amra selalu berbicara tentang pengembalian hak-hak gaji PNS yang diberhentikan. Oleh karena itu, ia selalu aktif mengirimkan surat kepada presiden, Komnas Ham, dan lembaga terkait atas persoalan yang ia hadapi. Akan tetapi, bagi A. M. Hustin, keluasaan yang diberikan di era reformasi harus dilihat sebagai berkah demokrasi di mana setiap warga negara memiliki hak sama. Ruang kebebasan seharusnya dimanfaatkan untuk mendidik generasi muda. Persoalan kompensasi, permohonan maaf negara merupakan persoalan yang kedua, bahkan sebaliknya dapat memunculkan kembali benih disintegrasi.

Perbedaan pandangan ini bukanlah sesuatu yang *typical* antara Rasjidi Amra dan A.M. Hustin, tetapi mencerminkan perbedaan pandangan di antara eks tapol di Indonesia. Oleh karena itu, muncul beberapa organisasi eks tapol dengan tujuan yang berbeda, seperti Lembaga Penelitian Korban Peristiwa 65 (LPKP) dan Paguyuban Korban Orde Baru (PAKORBA). LPKP bertujuan untuk meneliti tragedi 1965, sedangkan PAKORBA tidak terbatas pada korban tragedi 65 saja, tetapi semua peristiwa-peristiwa pelanggaran HAM lainnya selama pemerintahan Orde Baru. Strategi perjuangan mereka umumnya dilakukan dengan cara-cara konstitusional, yaitu melakukan upaya-upaya hukum, perjuangan penghapusan produk undang-undang Orde Baru yang diskriminatif, menerbitkan bulletin-bulletin, majalah, dan melakukan kerjasama dengan berbagai lembaga-lembaga yang terkait di dalamnya. LPR-KROB sejauh ini telah melakukan kerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH), YLBHI, KONTRAS, KOMNAS HAM, Syarikat Yogyakarta, Organisasi anak muda NU di daerah-daerah, LSM serta partai/organisasi massa lainnya. Di samping juga menggalang kerjasama dengan organisasi sesama korban peristiwa September 1965. Langkah ini sebagai sikap untuk menjaga persatuan di antara korban peristiwa September 1965 (Warta DPP LPR-KROB Th V: Mei-Juni-Juli 2007).

Cara pandang yang berbeda antara Rasjidi Amra dan A.M. Hustin dalam memaknai keterbukaan era reformasi berpengaruh pada post memori. Muliadi, putra dari A. M. Hustin lebih memperlihatkan aktivitas yang mencerminkan memori yang ditransmisikan. Muliadi mulai mempublikasikan memori yang diwarisi dari orang tuanya melalui media sosial dan pementasan teater yang bertemakan isu sosial politik. Tokoh-tokoh yang ditampilkan dalam teater pun memperlihatkan betapa kekuatan memori yang telah ditransmisikan menjadi bagian integral dari dirinya. Sementara aktivitas Rasjidi Amra sebagai ketua LP-KROP masih memperlihatkan kurangnya transmisi memori ke post memori.

KESIMPULAN

Studi ini melihat produksi dan reproduksi memori dengan mengambil kasus dua orang eks tapol Moncongloe. Politik memori negara yang dipraktekkan dalam *kamp* pengasingan Moncongloe digeneralisir di setiap level melalui persempitan ruang sosial antara tapol dengan masyarakat, antara tapol itu sendiri serta antara tapol dengan petugas *kamp* Moncongloe, bertujuan untuk membangun hegemoni memori negara. Sementara praktik memori individu dalam dua kasus eks tapol memperlihatkan cara berbeda yang dipengaruhi oleh latar belakang eks tapol.

Demikian pula pada periode pembebasan, terdapat praktik memori yang berbeda dua kasus eks tapol dalam menurunkan memorinya ke generasi berikutnya. Jika Rasjidi Amra memperlihatkan transmisi memori kepada keluarganya secara tertutup, A. M. Hustin justru menurunkan memori kepada anaknya melalui media pendidikan, gambar, kisah yang dituturkan dan praktik-praktik perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Ruang keluarga sebagai ruang privasi menjadi satu-satunya tempat memori ditransmisikan. Praktik transmisi memori ini juga telah ditemukan dalam studi Marianne Hirsch yang menekankan pada generasi postmemory dan studi Katharine McGregor yang melihat *intergenerational memory*.

Perbedaan dalam praktik memori tidak hanya di era Orde Baru, tetapi kedua eks tapol dalam studi ini juga memperlihatkan cara berbeda dalam memaknai kondisi di era reformasi. Rasjidi Amra memperlihatkan praktik memori yang lebih pragmatis, berjuang untuk mendapatkan rehabilitasi dan kompensasi melalui organisasi, sementara A. M. Hustin lebih menekankan pada upaya publikasi memori dengan tujuan menciptakan generasi muda yang memahami sejarah dan mendorong sensitivitas sosial politik lebih tinggi. Studi ini memperlihatkan bahwa perbedaan dalam praktik menurunkan memori kepada generasi berikutnya, perbedaan dalam melawan hegemoni memori negara dipengaruhi

oleh latar belakang pendidikan, pekerjaan dan keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

Arsip dan Dokumen Pribadi

Petunjuk Pelaksanaan Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban Nomor JUKLAK-04/ KOPKAM/II/1974 Arsip Muhammad Pribadi Saleh Lahade Reg. 941.

Surat Keputusan Walikota Daerah Tingkat II Ujung Pandang dari tahun 1979 sampai tahun 1984 tentang pengesahan proyek pembinaan/penataran Khusus Ex Tapol G 30 S/PKI Arsip Kotamadya Ujung Pandang Reg. 936.

Surat Telegram DAN DIM 1408/BS kepada DAN RAMIL 1408-01 s/d 1408-11 Nomor 1607/1979 tanggal 5 - 5 - 1979 tentang larangan eks tapol menulis di media. Arsip Kotamadya Ujung Pandang Reg. 942.

Surat Gubernur Tingkat I Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 740.424/133/Pemb. Umum Tentang Larangan Mengajar badi Ex Tapol PKI, Arsip Kotamadya Ujung Pandang Reg. 944.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969, No. 61 (Jakarta: Sekretariat Negara RI: 1952.

Catatan Pribadi A. M. Hustin
Sketsa Ir. Rasjidi Amra

Buku, Artikel dan Majalah

Abdullah, Taufik. 2009. *Indonesia Towards Democracy*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.

Ahmad, Taufik. 2009. *Kamp Pengasingan Moncongloe*. Depok: Desantara.

———. 2012. 'South Sulawesi: Military, Political Prisoner, and Force Labour' in Douglas Kammen and Katharine McGregor (eds.), *The Contours of Mass Violence in Indonesia 1965-68*. Singapore: Asian Studies Association of Australia-NUS Press-Nias Press.

Bolles, Edmund Blair. 1988. *Remembering and Forgetting: Inquiries into the Nature of Memory*. New York: Walker and Company.

Conroe, Andrew Marc. 2012. 'Generating History: Violence and the Risks of Remembering for Families of Former Political Prisoners in Post-New Order Indonesia', University of Michigan.

Fenres, James, and Chris Wickham. 1992. *Social Memory: Social Memory: New Perspectives on the Past*. Cambridge: Balckwell.

Hirsch, Marianna. 2008. 'The Generation of Postmemory', *Poetic Today*, 29: 103-28.

Krisnadi. 2001. *Tahanan Politik Pulau Buru (1969-1979)* (Jakarta: LP3S).

Lestariningsih, Amurwati Dwi. 2011. *Gerwani: Kisah Tapol Wanita di Kamp*. Pelantungan. Jakarta: Kompas.

McGregor, Katharine E. 2002. 'Commemoration of 1 October, "Hari Kesaktian Pancasila": A Post Mortem Analysis?', *Asian Studies Review*, 6: 41-72.

———. 2013. 'Memory Studies and Human Rights in Indonesia', *Asian Studies Review*, 37: 350-61.

Morris-Suzuki, Tessa. 2005. *The past within us: Media, memory, history*. Verso: London New York.

Nasrallah, Laura. 2005. "The Politics of Memory." In *Autumn*. Harvard Divinity Bulletin.

Rappaport, Joanne. 1990. *The Politics of Memory: Native Historical Interpretation in the Colombian Andes*. Cambridge University Press.

Roosa, John, Ayu Ratih, and Hilmar Farid (ed.)^(eds.). 2004. *Tahun yang tak Pernah Berakhir: Memahami Pengalaman Korban 65* (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat. Jakarta: ELSAM.

Setiawan, Hersri. 2004. *Memoar Pulau Buru*. Yogyakarta: Indonesia Tera.

Toer, Pramoedya Ananta. 2000. *Nyanyian Sunyi Seorang Bisu*. Jakarta: Hasta Mitra.